

Ketatanegaraan Indonesia: Good Governance atau **Good** for **Governing** **Neoliberal** Performance

*Disampaikan pada Konferensi Warisan Otoritarianisme:
Tirani Modal dan Ketatanegaraan, 5-7 Agustus 2008, FISIP UI Jakarta*



R. Herlambang Perdana Wiratraman
Human Rights Law Studies (HRLS)
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pokok Presentasi

- ❑ Mengupas problematika ketatanegaraan Indonesia dari sudut pandang: Diskursus 'baik' dalam good governance
 - ❑ Bagaimana diskursus tersebut bekerja untuk memfasilitasi kepentingan politik dominan dalam strategi pembaruan undang-undang?
 - ❑ Bila dikaitkan dengan HAM, apakah HAM diakomodasi, disubordinasi ataukah dinegasikan?
-

Mitos Good Governance

- ❑ Apakah yang disebut dengan 'baik' atau paradigma kebaikan yang terkandung dalam Good Governance?
 - ❑ Difference ataukah Differance? (Derrida)
 - ❑ Good vs. Bad atau Good = Bad?
 - ❑ Bank Dunia (1992) menyebut 'crisis of governance' atau 'bad governance'
 - ❑ Diskursus good governance dominan sesungguhnya sangat terkait dengan strategi yang terhubung dengan 'donor-driven legal reform'
-

Bagaimana mitos bisa dipercaya di negara ini?

- ❑ Good governance secara sistematis menghegemoni dan secara halus membajak institusi negara dan non-negara, melalui institusi-institusi jembatan yang memistifikasi kekuasaan tak seimbang.
 - ❑ Institusi-institusi ini mereproduksi 'kebenaran' dan 'proyek imperatif' di bawah persyaratan-persyaratan utang, lebih khusus lagi dalam 'legal framework for development'.
 - ❑ Kontribusi terbesar adalah reformasi itu sendiri, dimana begitu banyak proyek good governance masuk dalam program dan agenda politik negara dan non-negara, dan lebih membumi, mulus dan subur dengan adanya desentralisasi ketatapemerintahan.
 - ❑ Siapa yang tidak percaya dengan keinginan untuk: akuntabilitas, responsif, transparan dan efisiensi? Bila percaya maka sepaham dengan proponent neoliberal, bila tidak percaya maka anti reformasi.
-

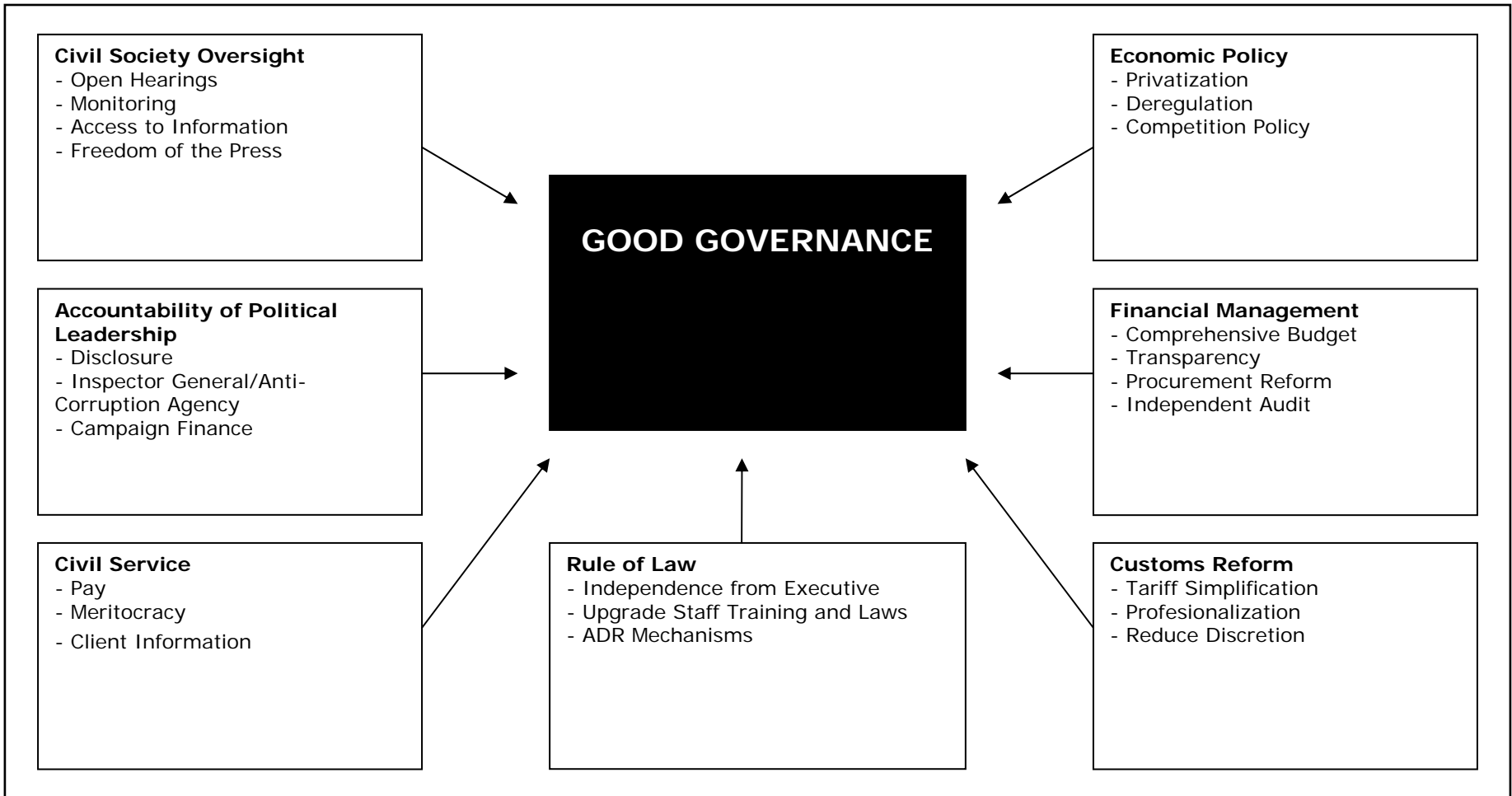
Bagaimana bisa transplantasi diskursus Good Governance rapi terjadi?

- Akuntabilitas ditujukan pada pembaharuan untuk kepentingan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang pro-liberalisasi pasar (*good governance free market assistance*).
- Perjumpaan doktrin rule of law, yang meyakini teknologi kekuasaan bersandar pada mekanisme ketatanegaraan yang absah.

Tsuma (1999: 85): *"Rule of law sebagai prasyarat untuk liberalisme kapital adalah konversi segala bentuk produksi: buruh, tanah, dan modal- ke dalam komoditas-komoditas yang memiliki nilai daya tukar mereka dalam pasar."*

- Good governance juga berbicara tentang HAM, namun HAM yang telah disaring atau diperlukan untuk menopang liberalisasi pasar.
-

Reforms for Improving Governance and Combating Corruption (World Bank)



Lalu, bagaimana Good Governance bekerja dalam agenda ekonomi-politik negara?

Agenda strategis kapital dalam dimensi ketatanegaraan:

- ❑ Pembaruan kebijakan pelayanan sipil
- ❑ Restrukturisasi kementerian negara
- ❑ Pembaruan hukum (perundang-undangan)
- ❑ Pembaruan peradilan
- ❑ Penataan hubungan pusat dan daerah
- ❑ Penarikan atau pelucutan peran negara (→ inilah yang kemudian betapa dominannya Privatisasi)

Vide: Kasus yang dihadapi buruh dalam konteks agenda tersebut sejak 1997-2006

First and Second Generation Reforms

(World Bank 1997b: 152)

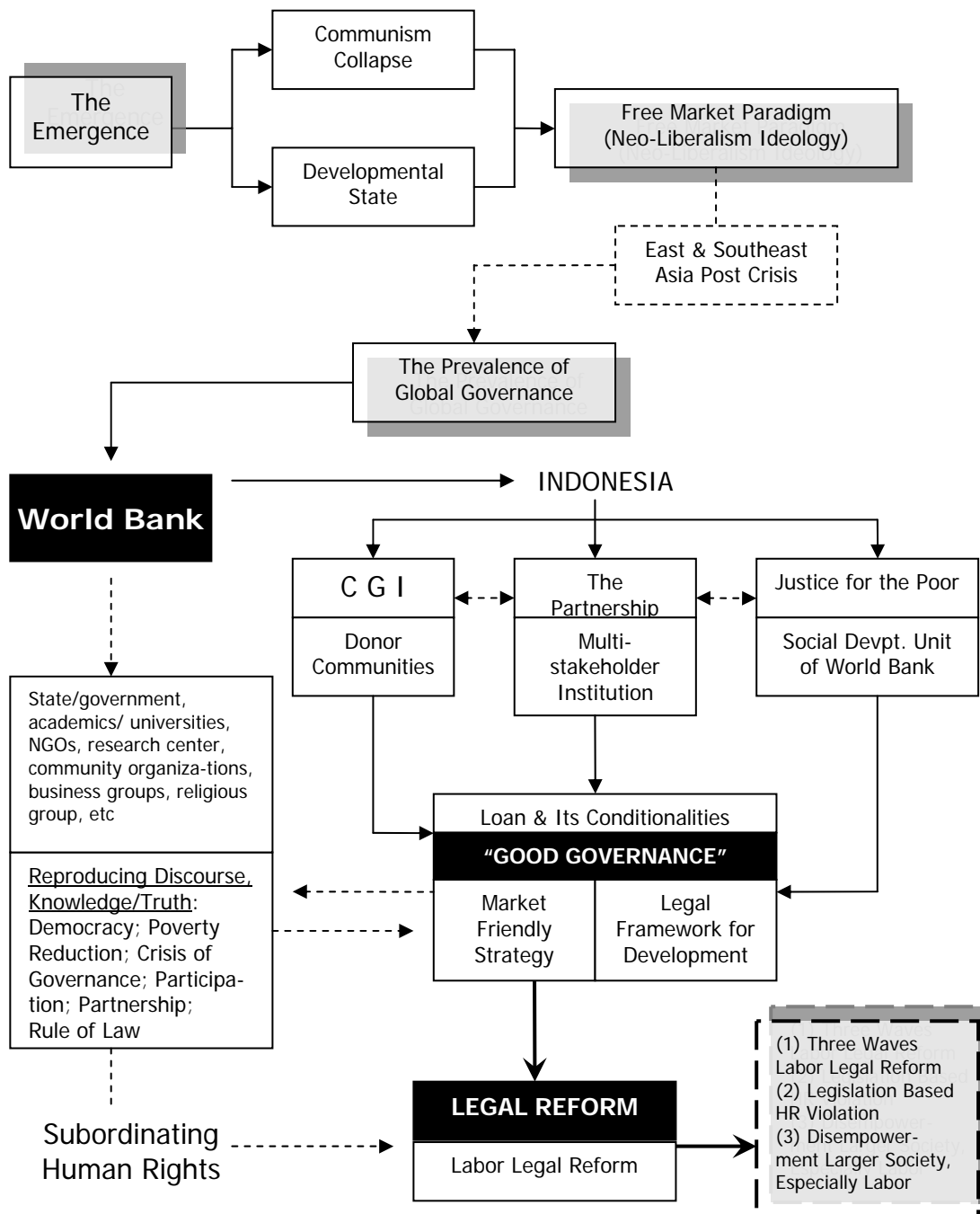
	First Generation	Second Generation
Main Objectives	Crisis Management: Reducing inflation and restoring growth	Improving social condition and competitiveness, maintaining macroeconomic stability
Instruments	Drastic budget cuts, tax reform, price liberalization, trade and foreign investment liberalization, deregulation, social funds autonomous contracting agencies, some privatization.	Civil service reform, labor reform, restructuring of social ministries, judicial reform, modernizing of legislature, upgrading of regulation, capacity improved tax collection, large-scale privatization, restructuring of central-local government relationship.

Action Matrix for Labor CGI (2005)

	Short-Term Actions (Within the first year)		Medium-term Actions (2-5 years)
A	Announce results of the review of the Manpower Law	A	Seek legislative approval of reforms to the Manpower Law designed to increase job growth
B	Establish more constructive mechanisms for determining minimum wages	B	Establish a national licensing system of specific skills through standardized national test.
C	Compile a “Customs Rule Book,” a collection of laws and regulations in force to be updated annually	C	Establish public facilities and services including a public job information center to improve labor productivity and flexibility.

Bagaimana Good Governance bicara tentang hak asasi manusia?

- ❑ Good governance dan hak asasi manusia (HAM) tidaklah berkontribusi dan memperkuat satu dengan yang lain (*disconnected*)
 - ❑ Good governance justru mensubordinasi dan bertentangan dengan HAM, bila HAM dalam kerangka Good Governance sekadar menempatkan posisinya sebagai pendukung liberalisasi pasar, oleh sebabnya diseleksi (*market friendly human rights paradigm*).
 - ❑ Good governance adalah alat untuk menghaluskan pelanggaran HAM dengan melegalkannya melalui institusi demokratis negara dan struktur ketatanegaraan/ketatapemerintahan pro-pasar (*softening human rights violation atau legalized violation of human rights*).
-



Good governance sebagai teknologi dan rasionalitas neoliberal yang rapi disiapkan untuk meluruhkan kedaulatan rakyat melalui pintu ketatanegaraan Indonesia

Mengapa kita terus menerus, latah dan percaya mitos good governance seolah-olah ia menjadi mantra yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit di negeri ini?

Terima kasih.....
